

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Melalui uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebelum menentukan apakah asas kerahasiaan merupakan asas yang umum dalam arbitrase komersial internasional serta bagaimana cakupan dari asas kerahasiaan, penulis menjabarkan perbedaan antara asas tertutup (*privacy*) dengan asas kerahasiaan (*confidentiality*) dalam arbitrase. Meskipun kedua hal tersebut sering dianggap sebagai asas yang sama, nyatanya keduanya berbeda. *Privacy* adalah sifat tertutup yang berkaitan dengan siapa saja yang dapat hadir dalam proses pemeriksaan arbitrase. Sedangkan *confidentiality* merupakan asas yang berkaitan dengan kewajiban para pihak yang hadir dalam proses pemeriksaan arbitrase untuk tidak membocorkan informasi yang terdapat dalam arbitrase. Terdapat beberapa sumber hukum asas kerahasiaan, antara lain bersumber dari peraturan institusi arbitrase, hukum arbitrase nasional, perjanjian tertulis antar para pihak, serta asas kerahasiaan sebagai asas yang tersirat dalam setiap perjanjian arbitrase. Asas kerahasiaan ini tidak dapat disebut sebagai asas umum yang berlaku dalam arbitrase komersial internasional, karena tidak semua aturan arbitrase menerapkan asas ini. Asas kerahasiaan tidak berlaku untuk sebagai aturan yang mencakup seluruhnya atau diberlakukan selalu dalam proses arbitrase komersial internasional, dan bahkan dalam beberapa keadaan tidak akan berlaku sama sekali. Permasalahan mengenai cakupan asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional meliputi objek-objek apa saja yang dilindungi oleh asas

kerahasiaan, subjek-subjek mana yang terikat dengan kewajiban untuk menjaga asas kerahasiaan, pengecualian atas asas kerahasiaan yang berlaku, serta sanksi atas pelanggaran asas kerahasiaan yang terjadi. Keberadaan asas kerahasiaan tidaklah bersifat absolut, di mana terdapat beberapa keadaan yang mengakibatkan pengecualian terhadap asas kerahasiaan haruslah digunakan. Pengecualian tersebut dapat berupa pengecualian berdasarkan kesepakatan, kepentingan publik, *interest of justice*, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran asas kerahasiaan ini, yaitu *non-monetary remedies* yang umumnya berupa *provisional measures*, dan *monetary remedies*, yang merupakan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atas asas kerahasiaan. Melalui contoh-contoh-contoh yang diberikan oleh penulis, dapat dilihat bahwa pembahasan pendekatan terhadap asas kerahasiaan yang diambil oleh institusi arbitrase serta negara tidaklah seragam dan berbeda-beda satu sama lain. Penggunaan kerahasiaan disini juga akan bergantung pada peraturan prosedural yang disepakati oleh para pihak atau peraturan institusi yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

- b. Kerahasiaan dan transparansi memiliki hubungan yang rumit dalam ranah arbitrase komersial internasional. Ada kebutuhan untuk mengembangkan keseimbangan antara jaminan yang menarik pihak komersial ke arbitrase dan kebutuhan bersama untuk menjaga nilai kewajaran dan keadilan. Meskipun kerahasiaan dan transparansi telah digambarkan sebagai nilai-nilai yang bersaing, mereka dapat hidup berdampingan dalam praktiknya. Dalam upaya mencapai keseimbangan yang tepat, arbitrase komersial internasional berdiri untuk memperoleh keuntungan baik dari transparansi maupun kerahasiaan, dan prinsip-prinsip ini tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Selain itu, kerahasiaan sebenarnya memainkan peran yang menekan munculnya doktrin preseden. Kerahasiaan mendorong

diinginkanya sebuah transparansi agar dapat mengkritisi proses arbitrase dan putusan dari arbitrase itu sendiri. Terdapat pemikiran bahwa walaupun preseden tidaklah mengikat, tetapi seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan arbiter atau majelis arbitrase, agar terdapat sebuah konsistensi putusan. Dalam penelitian ini terdapat usulan penerapan versi adaptasi dari *The UNCITRAL Rules of Transparency* untuk menangani kebutuhan akan transparansi yang lebih besar dalam arbitrase komersial internasional. *The UNCITRAL Rules of Transparency*, sebagai otoritas yang mapan dan diterima dalam arbitrase investor-negara, memiliki potensi untuk menandai era baru transparansi dalam arbitrase komersial internasional. Aturan yang mirip dengan *WIPO Arbitration Rules* juga harus menjadi bagian dari inisiatif ini untuk menangani kasus-kasus di mana kerahasiaan merupakan masalah komersial atau hukum. *WIPO Arbitration Rules* ini dapat memberikan penilaian mengenai apa yang bisa diungkapkan dan apa yang tidak bisa diungkapkan untuk tetap dijaga dengan kerahasiaan. Selanjutnya, analisis yurisdiksi terhadap praktik privasi dan kerahasiaan dalam arbitrase di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa tidak hanya norma transparansi internasional yang terlambat datang, tetapi juga bahwa sebagian besar yurisdiksi tampaknya enggan menjelajah ke pengembangan norma semacam itu. Dihadapkan dengan keengganan seperti itu, adopsi dan integrasi doktrin *The Work-Product* dalam aturan untuk meningkatkan prediktabilitas dalam arbitrase komersial internasional akan menjadi pendekatan yang dapat diterima. Doktrin *The Work Product* akan membantu dalam menentukan batas-batas yang seragam untuk hal-hal yang tidak ditentukan atau didefinisikan secara luas terhadap pengecualian kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional. Doktrin ini juga memiliki potensi untuk membuat praktik arbitrase lebih dapat diprediksi dan untuk menyembuhkan banyak kekurangan dari proses arbitrase komersial internasional. Kerahasiaan adalah salah satu alasan utama mengapa pihak yang bersengketa

memilih arbitrase ini daripada litigasi. Ada bidang-bidang di mana publikasi materi atau informasi tertentu dapat memiliki konsekuensi yang merugikan pada reputasi atau kegiatan bisnis dari pihak yang berselisih atau bersengketa. Dengan demikian, tidak mungkin ada tingkat transparansi umum yang diterapkan secara seragam untuk semua kasus dan ada kebutuhan untuk aplikasi kasus per kasus. Kerahasiaan lengkap dan transparansi lengkap tidaklah bijaksana atau tidak mungkin diterapkan secara realistis. Asas kerahasiaan ini masih diinginkan dan diharapkan oleh pihak yang berselisih menggunakan arbitrase dalam proses penyelesaiannya. Sanitasi dari putusan arbitrase yang dipublikasi akan hal yang dapat merugikan reputasi para pihak secara krusial juga dapat dilakukan dalam hal menyeimbangkan kedua nilai tersebut.

## 2. Saran

Seperti yang telah kita lihat, terlepas dari pengertian umum bahwa proses arbitrase bersifat privat, tidak ada konsensus umum mengenai sifat rahasianya. Pengaturannya tidak hanya berbeda secara signifikan antara yurisdiksi dan institusi arbitrase, tetapi sangat sering mereka juga tidak jelas dan tidak lengkap pada ruang lingkup dan cakupannya. Situasi saat ini mengarah pada ketidakpastian bahkan pada beberapa masalah mendasar. Oleh karena itu, sulit untuk mengidentifikasi hak hukum yang kuat untuk menjaga kerahasiaan, serta untuk membatasi jangkauan subjektif dan substantifnya. Selain itu, hukum yang berlaku di banyak negara mungkin tidak konsisten satu sama lain. Akibatnya, seseorang yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan juga dapat dikenakan kewajiban yang bertentangan untuk mengungkapkan informasi yang sama. Hal ini juga berakibat tidak mungkin untuk menarik kesimpulan umum untuk menetapkan ada atau tidak adanya kewajiban kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional.

Mengingat pendekatan yang berbeda untuk kerahasiaan dan tidak adanya standar yang diakui secara universal, cara terbaik untuk menjamin kerahasiaan menurut penulis adalah dengan menandatangani (baik sebelum atau selama proses) klausa khusus di mana para pihak harus menentukan ruang lingkup, tingkat, durasi dari kewajiban kerahasiaan, pengecualiannya dan bagaimana hal itu dapat ditegakkan. Tidak diragukan lagi kepentingan para pihak harus dilindungi dalam arbitrase komersial internasional, serta integritas dari proses arbitrase itu sendiri. Kepentingan tersebut tidak akan gagal dilindungi oleh tingkat transparansi yang lebih tinggi, jika diatur dengan baik oleh institusi arbitrase komersial internasional, di bawah kendali dan arahnya, berkat netralitas, kompetensinya, dan profesionalisme. Keseimbangan dapat ditemukan melalui peran penting institusi arbitrase. Jika reputasi institusi arbitrase yang ditunjuk adalah baik, para pihak dapat yakin bahwa, dengan memilih aturan dan bergantung pada kegiatan administrasi dari institusi tersebut, prosesnya akan dirahasiakan dan publikasi putusan tidak akan membahayakan kepentingan dan hak mereka misalnya dengan adanya seperangkat pedoman yang harus diikuti dalam memublikasikan putusan arbitrase dengan "sanitasi" putusan terlebih dahulu. Ukuran dari keseimbangan antara keduanya dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan pada proses arbitrase komersial internasional yang rahasia tidak akan mendatangkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa dan dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi dasar diinginkannya suatu transparansi dalam proses maupun putusan arbitrase tersebut. Hal tersebut dapat dicapai dengan mempertimbangkan dari kasus per kasus yang dapat ditransparansi apabila terdapat kepentingan publik di dalamnya, mengingat bahwa arbitrase komersial ini merupakan arbitrase yang berada dalam ranah privat, sehingga tidak mungkin dalam setiap kasus terdapat kepentingan dari masyarakat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alberto Malatesta dan Rinaldo Sali. 2013. *The Rise of Transparency in International Arbitration: The Case for The Anonymous Publication of Arbitral Awards*, USA : JurisNet LLC.
- Alan Redfern dan Martin Hinter. 2004. *Law and Practice of International Commercial Arbitration 4th ed.*, London:Sweet & Maxwell.
- Andrea Bianchi dan Anne Peters. 2013. *Transparency in International Law*, Cambridge University Press:Cambridge.
- Bender. 1990. *Private Investors Abroad: Problems and Solutions in International Business in 1989*, Dallas:The Southwestern Legal Foundation Dallas.
- Emmanuel Gaillard dan John Savage. 1999. *Fouchard, Gailard, Goldman on International Commercial Arbitration*, Hague: Kluwer Law International.
- Emmanuel Gaillard and Younan. 2008. *State Entities in International Arbitration* (IAI Series on International Arbitration No 4, Juris Publishing.
- Eman Suparman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Gary B. Born. 2009. *International Commercial Arbitration*, Hague: Kluwer Law International.
- Ileana M. Smeureanu. 2011. *Confidentiality in International Commercial Arbitration*, Hague: Kluwer Law International.
- Julian D.M. Lew, et.al. 2003. *Comparative International Commercial Arbitration*, Hague: Kluwer Law International.
- Kyriaki Noussia. 2009. *Confidentialityin Indonesia Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of The Position Under English, US, German, and French Law*, Hamburg: Springer.

Lauterpacht. 1982. *The Development of International Law by the International Court*, Cambridge University Press:Cambridge.

Ronald Bernstein. 1987. *Handbook of Arbitration Practice*, London: Sweet & Maxwell.

Quentin Loh Sze On Sc dan Edwin Lee Peng Khoon. 2007. *Confidentiality in Arbitration: How Far Does it Extend?*, Singapura: Singapore Academy Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

#### **Jurnal dan Artikel:**

Alexis Brown. 2001. *Presumption Meets Reality: An Exploration of The Confidentiality Obligation in International Commercial Arbitration*.

Andrea Bianchi dan Anna Peters. 2013. *Transparency In International Law* 142.

Andrew Tweeddale. 2014. *Confidentiality in Arbitration and the Public Interest Exception*, 21 ARB. INT'L 59.

Anjanette H. Raymond. 2005. *Confidentiality in a Forum of Last Resort: Is the Use of Confidential Arbitration a Good Idea for Business and Society?*, 16 AM. REV. INT'L ARB. 479.

Antonias Dimolista. 2009. *Institutional Rules and National Regimes Relating to The Obligation of Confidentiality on Parties in Arbitration in Confidentiality in Arbitration*, ICC ICArb Bull., Special Supplement.

Bernardo M. Cremades dan Rodrigo Cortes. 2013. *The Principle of Confidentiality in Arbitration: A Necessary Crisis*.

Catherine A. Rogers. 2006. *Transparency in International Commercial Arbitration*, 54 U. KAN. L. REV. 1301.

- Christina Knahr dan August Reinisch. 2007. *Transparency versus Confidentiality in International Investment Arbitration - The Bewater Gauff Compromise*, 6 The L. AND Prac. OF INT'L CTS. And Tribunals 97.
- Christoph Henkel. 2010. *The Work-Product Doctrine as a Means toward a Judicially Enforceable Duty of Confidentiality in International Commercial Arbitration*, 37 N.C. J. OF INT'L L. 1059.
- Christopher Boog dan James Menz. 2014. *Arbitrating IPO Disputes: The 2014 WIPO Arbitration Rules*, 24 J. ARB. STUD. 105.
- Cindy G. Buys. 2003. *The Tensions between Confidentiality and Transparency in International Arbitration*, 14 AM. REV. INT'L ARB. 121.
- Claudia Reith. 2012. *Enhancing Greater Transparency in the UNCITRAL Arbitration Rules : A Futile Attempt?*, 2 Y.B. ON INT'L ARB. 297.
- Collins. 1995. *Privacy and Confidentiality in Arbitral Proceedings*, Arb Int'l 11(3).
- Cornel Marian. *Sustainable Investment Through Effective Resolution of Investment Disputes – Is Transparency The Answer?* Diunduh dari [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2070676](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070676)
- David Fraser. *Confidentiality in Arbitration*, diunduh di [http://www.bakerinfo.com/Publications/Documents/756\\_tx.htm](http://www.bakerinfo.com/Publications/Documents/756_tx.htm)
- David F. Herr. 2005. *Annotated Manual for Complex 4th edition*, Thompson West.
- David H. Denton dan Michael D.G. Heaton. 2014. *Commercial Arbitration - Does it Really Have a Future?*, 4 VICTORIA U. L. & JUST. J. 117.
- David ST John Sutton, et al., *Russel on Arbitration*, 24th edition.
- Dimitrij Euler, et.al. 2015. *Transparency in International Investment Arbitration: A guide to The UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration*, 1st edition.
- Dora Marta Gruner. 2003. *Accounting for the Public Interest in International Arbitration: The Need for Procedural and Structural Reform*, 41 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 923.



- F. A. Mann. 1983. *The Aminoil Arbitration*, 54 BRIT. Y.B. INT'L L. 213.
- Feliciano, 2013. *The "Ordre Public" Dimensions of Confidentiality and Transparency in International Arbitration: Examining Confidentiality in the Light of Governance Requirements in International Investment and Trade Arbitration*, dalam Nakagawa, J, ed, *Transparency in International Trade and Investment Dispute Settlement* ,Routledge, Oxon.
- Francis A. Mann. 1983. *The Aminoil Arbitration*, 54 BRIT. Y.B. INT'L L. 213.
- Francisco Blavi. 2016. *A Case in Favour of Publicly Available Awards in International Commercial Arbitration: Transparency v Confidentiality*.
- Gabrielle Kauffman-Kohle. 2007. *Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse?* 23 ARB. INT'L. 357.
- Gaillard. 2013. *Transcending National Legal Orders for International Arbitration*, dalam van den Berg, AJ, ed, *International Arbitration: The Coming of a New Age?* ,ICCA Congress Series No 17, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.
- Gary B. Born. 2012. *International Arbitration: Law and Practice*, 1st edition.
- Goldhaber. 2005. *Sneak Peek: An Inside Look at More than 100 Major Disputes from The Secret World of Arbitration*, Focus Europe, diunduh di <http://www.americanlawyer.com/focuseurope/score-card0605.html>
- Jerzy Rajski. 1999. *Arbitration in Central and Eastern Europe*, 2 Int'l Arb.L. Rev. 47.
- Juan Fernandez-Armesto. 2012. *Salient Issues of International Arbitration*, 27 AM. U. INT'L L. R. 721.
- Kimberley Chen Nobles. 2012. *Emerging Issues and Trends in International Arbitration*, 43 CAL. W. INT'L L.J. 77.
- Klaus Peter Berger. 1998. *International Arbitration Practice and the Unidroit Principles of International Commercial Contracts*, 46 AM. J. COMP. L. 129.

- Laurence Boisson de Chazournes dan Rukia Baruti. 2015. *Transparency in Investor-State Arbitration: An Incremental Approach*, 2 BCDR INT'L ARB. REV. 58.
- Leon E. Trackman. 2002. *Confidentiality in International Commercial Arbitration*, 18-1 Arb. Int'l 1-18.
- Mark Fenster. 2019. *The Opacity of Transparency*, diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=686998>
- Matthew Carmody. 2016. *Overturing the Presumption of Confidentiality: Should The UNCITRAL Rules on Transparency be applied to International Commercial Arbitration?*, 19 INT'L TRADE & BUS. L. REV. 96.
- Paul Finn. 1984. *Confidentiality and the "Public Interest"*, 58 AUSTL. L. J. 497.
- Paul Marcus dan Vicki Waye. 2004. *Australia and the United States: Two Common Criminal Justice Systems Uncommonly at Odds*, 12 TUL. J. INT'L & COMP. L. 27.
- Paula Hodges. 2012. *The Perils of Complete Transparency in International Arbitration - Should Parties Be Exposed to the Glare of Publicity?*, 3 PARIS J. OF INT'L ARB. 589.
- Paulsson dan Rawding. 1994. *The Trouble with Confidentiality*, 5(1) ICC Bulletin.
- Pedro J. Martinez-Fraga. 2012. *Juridical Convergence in International Dispute Resolution: Developing a Substantive Principle of Transparency and Transnational Evidence Gathering*, 10 LOY. U. CHI. INT'L L. REV. 37.
- Peter Ashford. 2011. *Rule Changes Affecting the International Arbitration Community*, 22 AM. REV. INT'L ARB. 87.
- Rabinovitch-Einy O. 2002. *Going Public: Diminishing Privacy in Dispute Resolution in The Internet Age*, Va J L Tech 7(4): 1-26. Diunduh di [http://www.vjolt.net/vol7/issue2/v7i2\\_a004-Rabinovitch-E](http://www.vjolt.net/vol7/issue2/v7i2_a004-Rabinovitch-E).
- Robert D. Argon. 2014. *Ending Blind Spot Justice: Broadening the Transparency Trend in International Arbitration*, 40 BROOK. J. INT'L L. 207.

- Rodrigo Garcia Da Fonseca dan André De Luiz Correia. 2013. *The Limits of Confidentiality in arbitration: A Brazilian perspective*, 3 Y.B. ON INT'L ARB. 119.
- Rovine. 2010. *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation*, The Fordham Papers.
- Samuel Levander. 2014. *Resolving "Dynamic Interpretation": An Empirical Analysis of the UNCITRAL Rules on Transparency*, 52(2) COLUM. J. TRANSNAT'L L. 506.
- Steven Kouris. 2005. *Confidentiality: Is International Arbitration Losing One of Its Major Benefits?*, 22J.Int'l Arb.127.
- Thomas E. Carbonneau. 1985. *Rendering Arbitral Awards with Reasons: The Elaboration of a Common Law of International Transactions*, 23 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 579.
- Vijay Bhatia et al. 2009. *Confidentiality and Integrity in International Commercial Arbitration Practice*, 75(1) ARB. 2.
- Yassin El-Ayouty. 1997. *Challenges Facing Inter-Governmental Political Negotiations Which Are Common to International Business Negotiators: An Analysis of Shared Concerns*, 3 ILSA J. INT'L & COMP. L. 829.
- Yves Derains. 2009. *Evidence and Confidentiality*, ICC ICArb Bull., Special Supplement.
- Yves Dezalay dan Bryant G. Garth. 1996. *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and The Construction of a Transnational Legal Order* 9.

**Kasus-Kasus:**

- Ali Shipping Corp. v. Shipyard Trogir (1998) 1 Lloyd's Rep.643.
- Hassneh Ins.co. of Israel v Mew, 2 Lloyd's Rep.243.
- Insurance Co v Lloyd's Syndicate (1995) 1 Lloyd's Rep.272.
- Emmot v Michael Wilson and Partners Ltd (2008) EWCA civ 184.

Fireman's Fund Insurance Company v United Mexican States, Award, ICSID Case No ARB(AF)/02/01, 17 July 2006.

Dolling Baker v. Merret, 1 W.L.R 1205.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum:**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia Arbitration Rules.

London Court of International Arbitration Rules.

Rules of Arbitration of The International Chamber of Commerce.

Singapore International Arbitration Centre International Arbitration Rules.

The International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention 1965.

The International Centre for Settlement of Investment Disputes Arbitration Rules.

World Intellectual Property Organization Arbitration Rules.

New Zealand Arbitration Act 1996.

Norwegian Arbitration Act of May 14, 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara 3872.

Spanish Law Number 60 Year 2003 on Arbitration.

**Lainnya:**

Banifatemi. 2010. *Mapping the Future of Investment Treaty Arbitration*, American Society of International Law – Proceedings of the 103rd Annual ASIL Meeting.

International Law Association. 2010. *The Hague Conference : Confidentiality on International Commercial Arbitration*.

Licensor v Licensee. 1992. ICC Case No 6363, Final Award, 1991, XVII Yearbook of Commercial Arbitration.

Kaufmann-Kohler. 2007. *Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? The 2006 Freshfields Lecture*, 23(3) Arbitration International.

Manfred Heider, "Future Work In The Field of Arbitration: Confidentiality of Information in Arbitral Proceedings; Raising Claims in Arbitral Proceedings

*for the Purpose of Set Off*” makalah disampaikan pada UNCITRAL and VIAC Conference “20 Years of UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Vienna, Maret 2005.

Meg Kinnear. 2005. *Transparency and Third Party Participation in Investor-State Dispute Settlement*, makalah disampaikan pada simposium “*Making The Most of International Investment Agreement: A Common Agenda*” yang diselenggarakan oleh ICSID. OECD, dan UNCTAD di Paris.

Sir Bernard Rix, Speech at Singapore Management University: *Confidentiality in International Arbitration: Virtue or Vice?* , Diakses dari [http://law.smu.edu.sg/sites/default/files/law/CEBCLA/Notes\\_Confidentiality\\_in\\_International\\_Arbitration.pdf](http://law.smu.edu.sg/sites/default/files/law/CEBCLA/Notes_Confidentiality_in_International_Arbitration.pdf)

